



Pengaruh Media Sosial Dalam Mengomunikasikan Kebijakan Pemerintah Terhadap Orientasi Politik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia

Nurul Hanifah ^{1,a*}

^a Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹nurulhanifh06@upi.edu*

*korespondensi penulis

Informasi artikel :

Received: 11 November 2024;

Revised: 20 November 2024;

Accepted: 27 November 2024.

Kata-kata kunci:

Media Sosial;

Kebijakan Pemerintah;

Orientasi Politik.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan media sosial sebagai sarana komunikasi politik kebijakan pemerintah, untuk mengetahui platform media sosial yang menjadi akses mahasiswa mendapatkan informasi kebijakan pemerintah, dan untuk mengetahui bagaimana taggapa mahasiswa dalam menyikapi kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Metode yang digunakan adalah metode survei. Metode pengumpulan data dilakukan dengan pembagian kuesioner kepada tiga puluh tiga orang. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan presentasi deskriptif dari diagram. Hasil menunjukkan bahwa mahasiswa UPI dapat mengetahui informasi mengenai kebijakan pemerintah, peristiwa politik, dan sistem politik melalui media sosial sebagai sarana untuk mengomunikasikan politik. Platform media sosial yang digunakan oleh mahasiswa UPI untuk mendapatkan informasi politik melalui Instagram, Twitter, Facebook dan Youtube dengan mengikuti akun actor politik, organisasi politik atau akun edukasi politik. Media sosial dapat mempengaruhi tingkat orientasi politik mahasiswa UPI serta dapat mempengaruhi tipe budaya politik mahasiswa UPI dari tahap parokial, kaula dan partisipan.

ABSTRACT

The Influence of Social Media in Communicating Government Policy on the Political Orientation of Indonesian Education University Students. The purpose of this research is to find out the role of social media as a means of political communication for government policies, to find out which social media platforms are used by students to get information on government policies, and to find out how students respond to policies given by the government. The method used is a survey method with a cross-sectional design. The method of data collection was done by distributing questionnaires to thirty-three people. The method of data analysis was carried out using a descriptive presentation of the diagram. The results show that UPI students can find out information about government policies, political events, and political systems through social media as a means to communicate politics. A social media platform used by UPI students to get political information through Instagram, Twitter, Facebook and Youtube by following accounts of political actors, political organizations or political education accounts. Social media can affect the level of political orientation of UPI students and can influence the type of political culture of UPI students from the parochial, subject and participant stages.

Keywords:

Social Media;

Government Policy;

Political Orientation.

Copyright © 2024 (Nurul Hanifah). All Right Reserved

How to Cite : Hanifah, N. (2024). Pengaruh Media Sosial Dalam Mengomunikasikan Kebijakan Pemerintah Terhadap Orientasi Politik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(12), 410–422.
<https://doi.org/10.56393/decive.v4i12.2577>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Semakin pesatnya perkembangan internet, dunia komunikasi pun ikut serta dalam arus berkembang tersebut. Saat ini proses interaksi dalam penyampaian dan penerimaan pesan sangat praktis, dengan memanfaatkan sarana atau media tertentu dalam jejaring internet. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan media jejaring sosial yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Media sosial tidak hanya praktis dan efisien tetapi juga cepat dalam menyebar luaskan informasi. Kehadiran media sosial dimanfaatkan sebagai media komunikasi oleh pemerintah, partai politik, aktivis, orang profesional, masyarakat pada umumnya ataupun komunitas kelompok (Anggraeni et al., 2021).

Media sosial seakan-akan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Dengan adanya perkembangan media sosial memudahkan masyarakat dalam mendapatkan berbagai informasi, salah satunya yaitu informasi mengenai politik. Besarnya potensi masyarakat dalam menggunakan media sosial, maka pemerintah mau tidak mau harus dapat bergabung ke media sosial untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat (Purworini 2014). Dalam dinamika kehidupan perpolitikan di masyarakat, komunikasi memiliki peranan penting dalam menyampaikan pesan dan memperoleh pesan terkait perpolitikan yang ada. Dalam bidang politik, masyarakat dapat dengan mudah mengetahui permasalahan politik yang ada, kebijakan politik yang ada dan dinamika politik lainnya.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Silih Agung Wasesa bahwa kehadirannya media sosial membuat informasi politik tidak hanya semakin massif, tetapi juga dapat mendistribusikan informasi dengan cepat dan bersifat interaktif. Media sosial ini cenderung menjadi sarana pemberitahuan informasi politik melalui akun individu, kelompok ataupun pihak yang sumber informasinya belum tentu dapat dipertanggung jawabkan (Susanto 2012). Media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana yang membangun jaringan komunikasi politik yang interaktif diantara kelompok politik dengan massa atau para simpatisan (Susanto 2012). Selain itu hal ini dapat dijadikan sarana yang efektif untuk mengetahui opini public terkait kebijakan-kebijakan pemerintah.

Setiap individu dapat dengan mudah memanfaatkan media sosial, karena memiliki karakternya yang fleksibel pada suatu instansi atau kelompok dalam menyebarkan informasi. Sebagaimana yang dikatakan oleh R Niken Widiastuti Dirjen Informasi dan Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, bahwa media sosial ini dapat dijadikan sebagai alat komunikasi kebijakan pemerintah. Penggunaan media sosial ini diharapkan dapat mempererat hubungan masyarakat dengan pemerintah dan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat (Purworini 2014).

Beberapa penelitian membuktikan dengan adanya media sosial memberikan dampak terhadap orientasi politik masyarakat. "Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Perubahan Budaya Politik" penelitian ini berfokus kepada perubahan budaya politik yang disebabkan oleh media sosial yang mempengaruhi dimensi orientasi politik terhadap sistem politik, input dan output. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, adalah tujuan yang menjadi fokus utama yaitu orientasi politik yang dimiliki mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peranan media sosial sebagai sarana komunikasi kebijakan pemerintah terhadap orientasi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan media sosial sebagai sarana komunikasi politik kebijakan pemerintah, untuk mengetahui platform media sosial yang menjadi akses mahasiswa mendapatkan informasi kebijakan pemerintah, dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan mahasiswa dalam menyikapi kebijakan yang diberikan oleh pemerintah (Anggraeni et al., 2022).

Saluran komunikasi merupakan bagian penting dari komunikasi politik, karena hal ini berhubungan dengan penyampaian pesan-pesan atau informasi politik (Siagian 2015). Melalui media sosial sebagai saluran komunikasi politik menjadi bagian penting untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang diberikan. Hal ini pula dapat mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat terhadap kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu media sosial ini menjadi sarana komunikasi yang dapat membawa orang atau penggunanya untuk berpartisipasi aktif

dan memberikan kontribusi dan timbak balik secara terbuka dalam mebagi informasi maupun memberi tanggapan dengan cepat secara online (Budiyono 2015).

Media Sosial merupakan hasil dari perkembangan teknologi komunikasi, yang dimana media komunikasi ini diakses menggunakan jaringan internet. Media sosial merupakan media baru, media baru ini merupakan media yang menawarkan digitalisasi, konvergensi, interaktid dan pengembangan jaringan dalam pembuatan pesan dan penyampaian pesan (Susanto 2012). Media sosial memiliki karakteristik yang luas dan terkoneksi dengan cepat, dengan sistem komunikasi yang dua arah dapat mengoptimalkan komunikasi dari berbagai sektor (Alam 2021). Media sosial adalah media online yang berbasis internet dimana memberikan kebebasan bagi penggunanya untuk dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, menciptakan konten, dan memungkinkan untuk berinteraksi antar pengguna secara langsung ataupun kelompok.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Susanto, media sosial memiliki banyak manfaat dalam meningkatkan kepeahaman demokratisasi komunikasi untuk dapat menuju masyarakat informasi yang adil dan sejahtera (Susanto 2012). Media sosial dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh setiap individu, instansi maupun kelompok karena karakteristiknya yang fleksibel dan mudah untuk melakukan penyebaran pesan. Esensinya media sosial merupakan sarana baru yang memberikan cara untuk berkomunikasi dengan interaktif secara online (Anggraeni et al., 2020).

Terdapat berbagai macam jenis dari media sosial yang diantaranya adalah Instagram, Facebook, Twitter, Blog, WhatsApp, Line dan sebagainya. Media sosial ini berkembang berbarengan dengan meningkatnya aplikasi berbasis internet yang memiliki sifat dua arah sehingga penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi informasi. Pada hakikatnya media sosial memberikan keleluasaan bagi setiap penggunanya untuk dapat berinteraksi secara intensif tanpa adanya batasan jarak dan waktu (Susanto 2012).

Komunikasi politik merupakan gabungan dari dua disiplin ilmu yaitu ilmu komunikasi dan ilmu politik. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan memberitahukan atau mengubah sikap, pendapat, perilaku baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sehingga dapat dikatakan bahwa komunikasi politik merupakan langkah dalam melakukan komunikasi yang berkaitan dengan politik, seperti pembuatan politik, penyebarluasan, penerimaan dan dampak informasi yang berkonten politik dengan interaksi secara langsung antar manusia atau melalui media massa.

Komunikasi politik memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan politik dari komunikator politik. Selain itu tujuan dari komunikasi politik selain menyampaikan informasi politik, tetapi juga dapat membentuk citra politik, membentuk pendapat umum, dan menarik simpati dari khalayak umum untuk meningkatkan partisipasi politik (Alfiyani 2018). Komunikasi politik ini merupakan cara penyampaian pesan yang bercirikan politik dan memiliki tujuan untuk dapat mempengaruhi public. Komunikasi politik dapat menjadi alat dalam memastikan keberlangsungan keputusan politik dalam proses persiapan dan pelaksanaan yang merupakan hasil kerjasama antara komunikator dan komunikan.

Kebijakan sebagaimana yang dijelaskan oleh Friedrich merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah di dalam lingkup tertentu dengan menunjukkan kesempatan serta hambatan dalam pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dengan rangka mencapai tujuan. Kebijakan dapat diartikan sebagai program kegiatan, takti, nilai dan strategi yang diberikan oleh seorang atau kelompok dimana dalam pelaksanaannya mempengaruhi orang banyak untuk mencapai tujuan tertentu. Pemerintah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh organisasi eksekutif dan jajarannya dalam memerintah untuk mencapai tujuan pemerintahan negara.

Kebijakan Pemerintah merupakan suatu serangkaian tindakan pemerintah yang dipilih dan dapat mempengaruhi sejumlah besar orang, sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Mc Rae dan Wilde. Sedangkan menurut Anderson, kebijakan pemerintah merupakan pengembangan kebijakan yang dilakukan oleh badan dan pejabat pemerintah. Badan-badan pemerintah ini diantaranya yaitu

pemerintahan seperti lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif dan pejabat pemerintah baik di tingkat nasional, regional maupun lokal.

Kebijakan pemerintah dalam implikasinya merupakan tindakan-tindakan pemerintah yang dapat berupa suatu program, nilai, taktik dan strategi. Tindakan pemerintah tersebut memiliki sifat yang mengikat bagi anggota masyarakat. Masing-masing tindakan pemerintah dari tiap lembaganya memiliki kewenangan politik, hukum dan finansial dalam menjalankannya. Tindakan yang diberikan oleh pemerintah ini bertujuan untuk dapat memecahkan permasalahan tertentu yang ada di kehidupan masyarakat. Kebijakan pemerintah ini memiliki tujuan tertentu yang diorientasikan agar terpenuhinya kepentingan masyarakat atau public.

Orientasi politik sebagaimana dijelaskan oleh Sarbaini merupakan interaksi yang dimiliki oleh seseorang di dalam kehidupan politiknya, dimana terdiri dari pengetahuannya, sikapnya nilai dan perilaku politiknya terhadap suatu partai politik, ideology politik ataupun sistem politik yang berlaku. Hal ini mempengaruhi perilaku politik di dalam interaksi politik yang mana akan membentuk tatanan politik. Orientasi politik ini dapat dikatakan juga sebagai budaya politik, sebagaimana yang dijelaskan oleh Gabriel Almond, bahwa budaya politik ini merupakan pola sikap dan orientasi dari individu terhadap politik di dalam anggota sistem politik.

Orientasi politik yang dimiliki oleh individu memiliki beberapa komponen diantaranya yaitu orientasi kognitif, orientasi afektif, dan orientasi evaluative. Orientasi kognitif merupakan orientasi yang berkaitan dengan pengetahuan tentang kepercayaan politik, peranan dan segala kewajiban input dan output yang dimiliki oleh setiap individu. Orientasi afektif merupakan orientasi yang berkaitan dengan perasaan yang dimiliki oleh setiap individu yang berkaitan dengan keterlibatan, penolakan terhadap objek politik baik dari segi peranannya para actor dan penampilannya. Lalu yang terakhir yaitu orientasi evaluative, dimana orientasi yang menilai dan beropini terkait objek-objek yang ada yang melibatkan kriteria, standar nilai dan kejadian dari setiap peristiwa politik (Sarbaini, Kiftiah, and Rahman 2014).

Metode

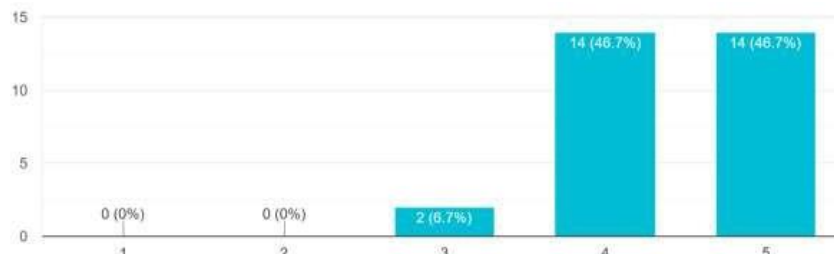
Penelitian ini menggunakan metode survei untuk mengumpulkan data dari populasi yang besar dengan menggunakan sampel yang relatif kecil. Metode survei memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperoleh data dari populasi dalam menentukan status populasi yang dimaksud dengan satu variabel atau lebih. Penelitian ini merupakan penelitian kausal yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel, yaitu pengaruh media sosial dalam mengomunikasikan kebijakan pemerintah terhadap orientasi politik mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Desain penelitian menggunakan survei cross-sectional, dengan populasi yang ditentukan adalah mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Instrumen yang digunakan adalah angket online melalui Google Form yang berisi pertanyaan mengenai peran media sosial sebagai sarana komunikasi politik, platform media sosial yang digunakan mahasiswa untuk mendapatkan informasi kebijakan pemerintah, dan tanggapan mahasiswa terhadap kebijakan tersebut. Skala likert digunakan untuk mengukur minat positif dan negatif responden. Proses penelitian dimulai dari perencanaan, pengumpulan data dengan membagikan kuesioner kepada responden, pengelolaan data, hingga analisis data deskriptif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara media sosial, kebijakan pemerintah, dan orientasi politik mahasiswa.

Hasil dan pembahasan

Pengukuran data ini dilakukan dengan menggunakan instrument kuesioner, adapun data yang diperoleh ini dianalisis dengan deskriptif presentase. Di dalam kuesioner disediakan sepuluh pertanyaan yang terdiri dari pertanyaan tertutup dan sebuah pernyataan dimana responden dapat memilih jawaban yang sesuai dengan apa yang dirasakan.

Untuk mengetahui bagaimana peranan media sosial sebagai sarana komunikasi politik kebijakan pemerintah diberikan kuesioner yang berisi pertanyaan mengenai informasi terkait politik yang didapatkan oleh mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia melalui media sosial. Terdapat tiga pertanyaan yang dipilih seletif dengan lima pilihan jawaban yang dibagikan kepada tiga puluh responden. Untuk pertanyaan pertama mengenai peran media sosial dalam menginformasikan peristiwa politik yang terjadi, dengan hasil sebagai berikut:

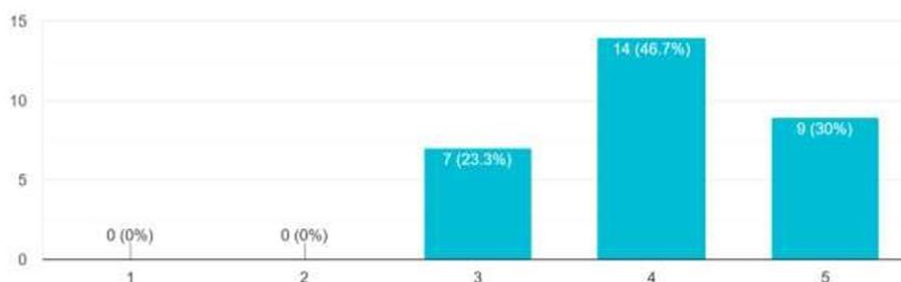
Diagram 1. Peran Media Sosial dalam Memberikan Indormasi Peristiwa Politik



Berdasarkan pertanyaan yang disediakan diperoleh hasil, terdapat 46,7% atau 14 orang menyatakan selalu, 46,7% atau 14 orang menyatakan sering dan 6,7% atau 2 orang menyatakan kadang-kadang dalam mendapatkan informasi mengenai persitiwa politik melalui media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dapat mengetahui informasi peristiwa politik melalui media sosial.

Pada pertanyaan kedua mengenai peran media sosial dalam menginformasikan jalannya sistem politik pemerintahan, diperoleh hasil sebagai berikut:

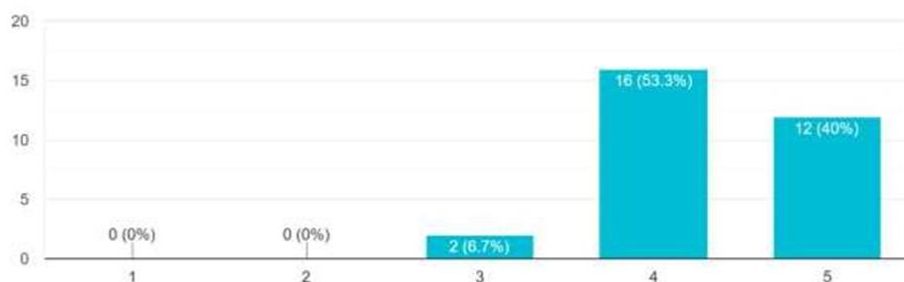
Diagram 2. Peran Media Sosial dalam Memberikan Informasi Sistem Politik Pemerintahan



Berdasarkan pertanyaan yang disediakan diperoleh hasil bahwa, 46,7% atau 14 orang menyatakan sering, 30% atau 9 orang menyatakan selalu dan 23,3% ataua 7 orang menyatakan kadang kadang bahwa melalui media sosial dapat mengetahui jalannya sistem politik pemerintahan. Dilihat dari tingginya presentase selalu dan seringnya, hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa universitas pendidikan Indonesia dapat mengetahui informasi mengenai jalannya sistem politik pemerintah melalui media sosial.

Pada pertanyaan ketiga mengenai peranan media sosial dalam menginformas ikan kebijakan public yang diberikan oleh pemerintah, memperoleh hasil sebagai berikut:

Diagram 3. Peran Media Sosial dalam Memberikan Informasi Kebijakan Pemerintah



Berdasarkan pertanyaan yang disediakan, diperoleh hasil bahwa 53,3% atau 16 orang menyatakan sering, 40% atau 12 orang menyatakan selalu dan 6,7% atau 2 orang menyatakan kadang-kadang, bahwa melalui media sosial dapat mengetahui informasi mengenai kebijakan public yang diberikan oleh pemerintah. Dilihat dari tingginya presentase selalu dan seringnya, hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa universitas pendidikan Indonesia dapat mengetahui informasi mengenai kebijakan public yang diberikan pemerintah melalui media sosial.

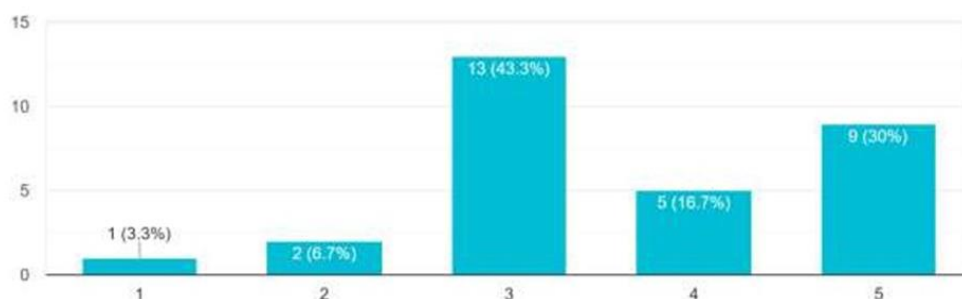
Dari data tersebut yang terdapat pada diagram 1, 2 dan 3 menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa UPI mendapatkan informasi terkait peristiwa politik, sistem politik dan kebijakan pemerintah melalui media sosial. Hal ini membuktikan bahwa media sosial ini dapat dijadikan sebagai alat komunikasi politik. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nur Alfiyani bahwa komunikasi politik pada dasarnya berkaitan dengan penyebaran, penerimaan dan dampak- dampak informasi yang berupa konten politik, baik melalui interaksi antar manusia maupun media massa. Media sosial ini merupakan media baru yang mempermudah interaksi antar manusia yang memiliki sifat fleksibel dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Media sosial ini telah memenuhi kriteria sebagai alat komunikasi politik, dimana melalui media sosial dapat terjadi interaksi antar manusia dan melalui media sosial ini dapat dilakukan penyebaran informasi yang berkonten politik (Paramitha, Hasan, Ilsa, et al., 2021).

Sebagaimana hasil dari data yang terdapat pada diagram 1, mengenai media sosial ini telah dapat menyebarkan informasi yang berkaitan dengan peristiwa politik. Selain itu hasil data pada diagram 2, mengenai media sosial yang telah menyebarkan informasi berkaitan dengan sistem politik pemerintahan. Dan hasil data pada diagram 3, dimana media sosial telah dapat menyebarkan informasi mengenai kebijakan public yang diberikan oleh pemerintah. Hasil dari ketiga data tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah dapat menyebarkan informasi yang berkonten politik. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial dapat dijadikan sebagai alat komunikasi politik.

Media sosial dapat memenuhi tujuan dari komunikasi politik sebagai media penyampai pesan politik yang disampaikan oleh komunikator politik. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nur Alfiyani bahwa tujuan dari komunikasi politik ini untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan politik, pembentukan cita politik dan membentuk pendapat umum. (Nur Alfiyani)

Untuk mengetahui platform media sosial yang digunakan oleh mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia sebagai akses dalam mendapatkan informasi kebijakan pemerintah diberikan kuesioner yang berisi dua pertanyaan yang berkaitan dengan hal tersebut. Dua pertanyaan ini dipilih seketif dengan lima pilihan jawaban yang dibagikan kepada tiga puluh responden. Untuk pertanyaan pertama mengenai aktifitas mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dalam mengikuti akun media sosial yang memberikan informasi mengenai kebijakan pemerintah, dengan hasil sebagai berikut:

Diagram 4. Mahasiswa UPI yang Mengikuti Akun Media Sosial yang Memberikan Informasi Politik

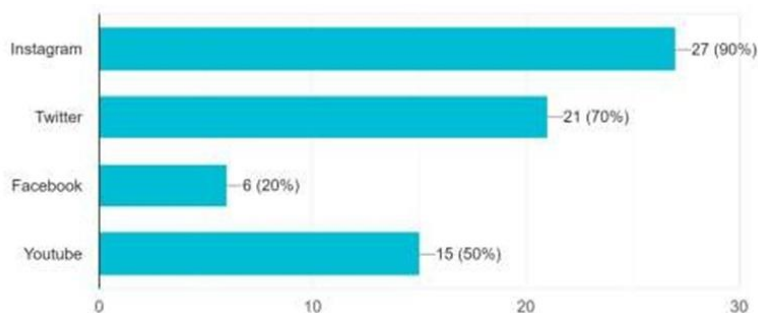


Berdasarkan pertanyaan yang disediakan, diperoleh data bahwa 43,3% atau 13 orang menyatakan kadang-kadang, 30% atau 9 orang menyatakan selalu, 16,7% atau 5 orang menyatakan sering, 6,7% atau 2 orang menyatakan jarang dan 3,3% atau 1 orang menyatakan tidak pernah mengikuti akun media sosial yang memberikan informasi mengenai kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa

sejumlah mahasiswa mengikuti akun media sosial yang memberikan informasi mengenai kebijakan pemerintah, dan sejumlah kecil mahasiswa yang tidak mengikuti akun media sosial yang memberikan informasi mengenai kebijakan pemerintah.

Pada pertanyaan kedua, mengenai platform media sosial yang digunakan oleh mahasiswa universitas Pendidikan Indonesia dalam mendapatkan informasi kebijakan politik yang diberikan oleh pemerintah didapatkan hasil sebagai berikut:

Diagram 5. Platform Media Sosial yang Digunakan Untuk Mengetahui Informasi Kebijakan Politik



Berdasarkan pernyataan yang disediakan diperoleh hasil bahwa, sebanyak 90% atau 27 orang menggunakan Instagram, sebanyak 70% atau 21 orang menggunakan Twitter, sebanyak 50% atau 15 orang menggunakan Youtube dan sebanyak 20% atau 6 orang menggunakan Facebook untuk mendapatkan informasi mengenai kebijakan politik yang diberikan oleh pemerintah.

Media sosial seakan-akan telah menjadi bagian di dalam kehidupan masyarakat. Adanya perkembangan teknologi komunikasi dalam bentuk media baru melahirkan media sosial dimana melalui media sosial ini dapat mempengaruhi kehidupan politik (Anshari 2013). Berdasarkan hasil data pada diagram ke 4 menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa UPI mengikuti akun media sosial yang memberitahukan informasi mengenai politik beserta kebijakan-kebijakan yang di buat oleh pemerintah.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Faridhian bahwa saat ini actor-aktor politik telah memiliki media sosial, yang salah satu manfaatnya dipergunakan untuk menginformasikan kebijakan yang ada. Baik dari Presiden beserta Wakilnya, para Menteri, Gubernur, Walikota, anggota Dewan dan actor politik lainnya menggunakan media sosial baik itu melalui platform Instagram, Twitter atau platform lainnya sebagai akun pribadinya. Selain actor politik terdapat pula organisasi politik yang memiliki akun media sosial. Selain itu terdapat pula akun khusus yang memberikan informasi seputar politik ataupun memberi edukasi terkait politik itu sendiri. Mahasiswa dapat dengan bebas mengikuti akun-akun media sosial tersebut dan mendapatkan informasi yang diberikan oleh akun tersebut (Paramitha, Hasan, Anggraeni, et al., 2021).

Menurut hasil data yang diperoleh pada diagram ke 5 menunjukkan bahwa mahasiswa dapat mendapatkan informasi mengenai kebijakan pemerintah dengan mudah melalui platform Instagram, lalu Twitter, youtube dan melalui Facebook. Hal tersebut sesuai dengan data statistic penelitian yang dilakukan oleh organisasi We are Social dan Kepios dimana terhitung pada bulan Februari 2022 masyarakat dari umur 16 sampai 64 tahun sebanyak 84,4% masyarakat Indonesia merupakan pengguna platform Instagram. Lalu sebanyak 81,3% masyarakat Indonesia merupakan pengguna platform Facebook. Sebanyak 58,3% dari masyarakat Indonesia merupakan pengguna Twitter. Dan sebanyak 50% dari masyarakat Indonesia merupakan pengguna platform Youtube (Kepios 2022)

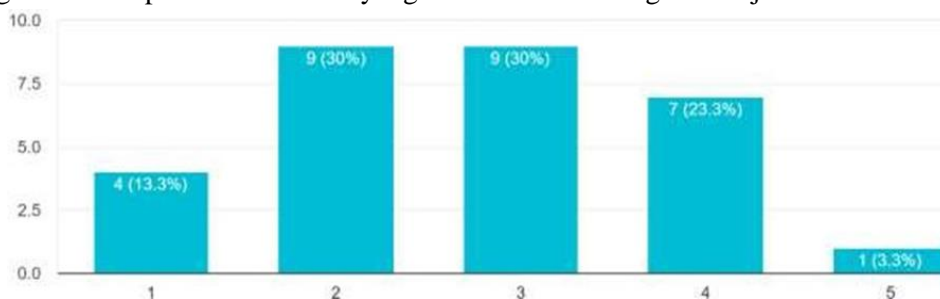
Dengan presentase banyaknya masyarakat Indonesia menggunakan platform media sosial Instagram, Facebook, Twitter dan Youtube, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tidak terlepas dengan platform-platform media sosial tersebut, terutama mahasiswa. Berdasarkan data statistic penelitian yang dilakukan oleh organisasi We are Social dan Kepios mengenai Penggunaan Digital Indonesia tercatat lebih dari 3 jam 17 menit, waktu yang digunakan untuk menggunakan media sosial

(Kepios 2022). Oleh karena itu hal ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-harinya masyarakat tidak pernah luput atau lepas dari media sosial.

Untuk mengetahui tanggapan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dalam menyikapi kebijakan yang diberikan oleh pemerintah diberikan kuesioner yang berisi lima pertanyaan yang berkaitan dengan hal tersebut. Lima pertanyaan ini dipilih seketif dengan lima pilihan jawaban yang dibagikan kepada tiga puluh responden. Untuk pertanyaan pertama mengenai respon tidak mengharapakan apapun dan ketidak tertarikan mahasiswa Universitas

Pendidikan Indonesia terhadap kebijakan pemerintah setelah mengetahui informasi tersebut melalui media sosial, dengan hasil sebagai berikut:

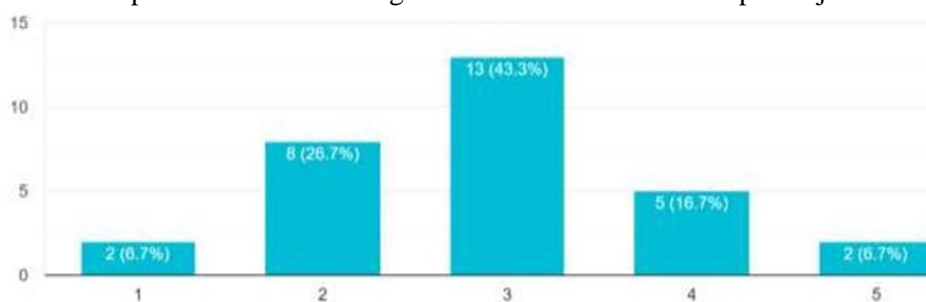
Diagram 6. Sikap Mahasiswa UPI yang Tidak Tertarik dengan Kebijakan Pemerintah



Berdasarkan pertanyaan yang disediakan diperoleh hasil, bahwa 30% atau 9 orang menyatakan kadang-kadang, 30% atau 9 orang menyatakan jarang, 23,3% atau 7 orang menyatakan sering, 13,3% atau 4 orang menyatakan tidak pernah dan 3,35% orang menyatakan selalu tidak mengharapakan apapun dan tidak tertarik sama sekali terhadap kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil data tersebut menunjukkan bahwa setelah mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia mengetahui informasi mengenai kebijakan pemerintah, mahasiswa tidak condong ke perilaku dan sikap yang tidak tertarik dan tidak mengharapakan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah.

Pertanyaan kedua mengenai respon mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang menerima dan pasrah apa adanya terhadap kebijakan pemerintah karena beranggapan bahwa kebijakan tersebut tidak dapat ditentang dan di rubah setelah mengetahui informasi tersebut melalui media sosial, dengan hasil sebagai berikut:

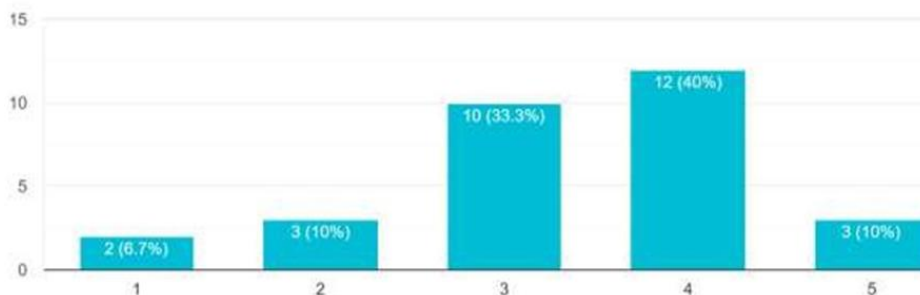
Diagram 7. Sikap Mahasiswa UPI dengan Menerima Pasrah terhadap Kebijakan Pemerintah



Berdasarkan pertanyaan yang diberikan, diperoleh hasil bahwa 43,3% atau 13 orang menyatakan kadang-kadang, 26,7% atau 8 orang menyatakan jarang, 16,7 % orang menyatakan sering, 6,7% atau 2 orang menyatakan tidak pernah dan 6,7% atau 2 orang menyatakan selalu menerima dengan pasrah dan apa adanya terhadap kebijakan pemerintah karena kebijakan tersebut tidak dapat ditentang ataupun diubah. Berdasarkan hasil data tersebut menunjukkan bahwa setelah mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia mengetahui informasi mengenai kebijakan pemerintah, mahasiswa tidak condong ke perilaku dan sikap yang menerima dengan pasrah dan apa adanya terhadap kebijakan pemerintah karena kebijakan tersebut tidak dapat ditentang ataupun diubah.

Pertanyaan ketiga mengenai respon mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang menentang atau mendukung kebijakan pemerintah setelah mengetahui informasi tersebut melalui media sosial, dengan hasil sebagai berikut:

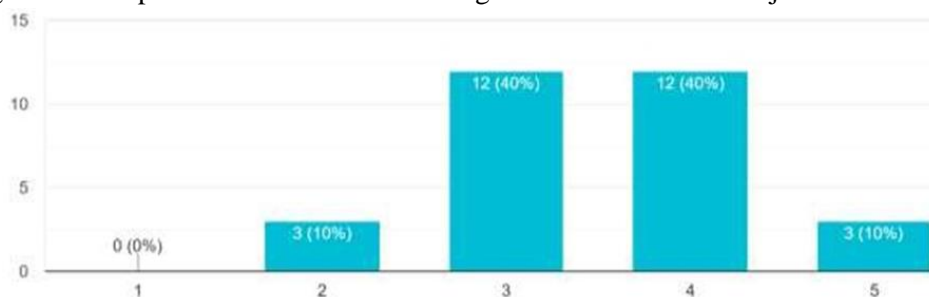
Diagram 8. Sikap Mahasiswa UPI yang Menentang dan Mendukung Kebijakan Pemerintah



Berdasarkan pertanyaan yang diberikan, diperoleh hasil bahwa 40% atau 12 orang menyatakan sering, 33,3% atau 10 orang menyatakan kadang-kadang, 10% atau 3 orang menyatakan selalu, 10% atau 3 orang menyatakan jarang dan 6,7% atau 2 orang menyatakan tidak pernah menentang ataupun mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Berdasarkan hasil data tersebut menunjukkan bahwa setelah mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia mengetahui informasi mengenai kebijakan pemerintah melalui media sosial, mahasiswa condong perilaku dan sikap yang menentang ataupun mendukung kebijakan pemerintah tersebut.

Pertanyaan keempat mengenai respon mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang mengkritisi dan menilai kebijakan pemerintah setelah mengetahui informasi tersebut melalui media sosial, dengan hasil sebagai berikut:

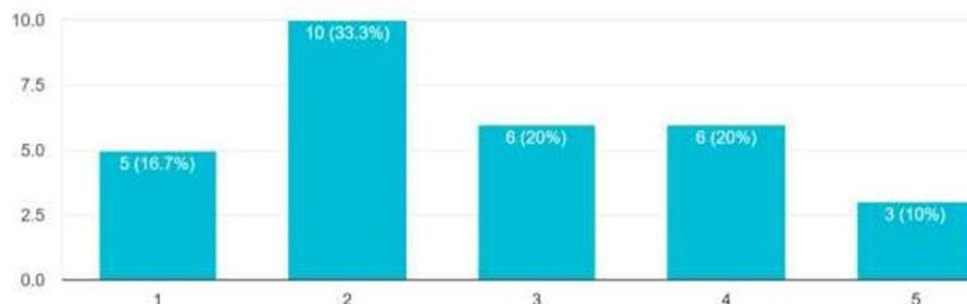
Diagram 9. Sikap Mahasiswa UPI dalam Mengkritisi dan Menilai Kebijakan Pemerintah



Berdasarkan pertanyaan yang disediakan, diperoleh hasil bahwa 40% atau 12 orang menyatakan sering, 40% atau 12 orang menyatakan kadang-kadang, 10% atau 3 orang menyatakan selalu dan 10% atau 3 orang menyatakan jarang mengkritisi dan menilai kebijakan pemerintah yang diberikan. Berdasarkan hasil data tersebut menunjukkan bahwa setelah mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia mengetahui informasi mengenai kebijakan pemerintah melalui media sosial, mahasiswa condong perilaku dan sikap yang mengkritisi dan menilai kebijakan pemerintah tersebut.

Pertanyaan kelima mengenai respon mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang mengkritisi dan menilai kebijakan pemerintah dengan memberikan respon melalui kolom komentar atau mengunggah langsung tanggapannya di media sosial, dengan hasil sebagai berikut:

Diagram 10. Sikap Mahasiswa UPI dalam Mengkritisi dan Menilai Kebijakan Pemerintah Secara Langsung Melalui Media Sosial



Berdasarkan pertanyaan yang disediakan, diperoleh hasil bahwa 33,3% atau 10 orang menyatakan jarang, 20% atau 6 orang menyatakan kadang-kadang, 20% atau 6 orang menyatakan sering, 16,7% atau 5 orang menyatakan tidak pernah dan 10% atau 3 orang menyatakan selalu memberikan respon di kolom komentar atau menggunggah langsung tanggapannya mengenai kebijakan yang diberikan pemerintah melalui media sosial. Berdasarkan hasil data tersebut menunjukkan bahwa sedikit mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dalam merespon kebijakan pemerintah dengan berkomentar langsung melalui kolom komentar atau menggunggah ke media sosial. Dan banyak mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang tidak merespon kebijakan pemerintah dengan berkomentar langsung melalui kolom komentar atau menggunggah di media sosial.

Dari data pada diagram 6, yang menunjukkan sedikitnya mahasiswa Universitas Indonesia yang memiliki sikap tidak tertarik dan tidak mengharapkan apapun dan rata-rata mahasiswa Universitas Indonesia yang tidak memiliki sikap tersebut terhadap kebijakan pemerintah setelah mengetahui informasi melalui media sosial. Lalu pada data dari diagram 7 menunjukkan sedikitnya mahasiswa Universitas Indonesia yang memiliki sikap menerima dengan pasrah dan adanya apapun dan rata-rata mahasiswa Universitas Indonesia yang menerima dengan pasrah dan apadanya terhadap kebijakan pemerintah karena kebijakan tersebut tidak dapat ditentang ataupun diubah setelah mengetahui informasi melalui media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi politik mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia atau sikap, nilai, pengetahuan dan perilaku mahasiswa dalam berinteraksi di kehidupan politik memiliki orientasi kognitif yang cukup tinggi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sarbaini dkk orientasi kognitif ini merupakan pengetahuan tentang kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajiban serta input dan outputnya (Sarbaini et al. 2014).

Sikap mahasiswa UPI yang memiliki ketertarikan dan memiliki harapan kepada kebijakann politik menunjukkan adanya pengetahuan mengenai politik dan kepercayaan terhadap politik, yang mana hal ini merupakan bagian dari orientasi sikap kognitif. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa media sosial ini dapat mempengaruhi orientasi kognitif pada mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (Malihah et al., 2020).

Hasil data pada diagram 6 dan 7 ini menunjukkan bahwa mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia terkait orientasi politiknya di dalam dimensi objek umumnya terbangun orientasi satu arah dimana mahasiswa berusaha mendekati diri kepada sistem politik yang ada. Melalui sikap ketertarikannya terhadap politik, kepercayaannya dan menaruh harapan terhadap politik. Orientasi politik pada dimensi objek umum ini merupakan dimensi politik yang ruang lingkungnya umum dan menyeluruh. Dimana mencakup peranan lembaga eksekutif, legislatif dan birokrasi politik. Yang mana dijelaskan oleh Prasajo orientasi yang dibangun pada dimensi ini bersifat satu arah, dimana masyarakat berusaha mendekati dengan sistem politik yang ada dan di sisi lain sistem politik tetap berjalan seperti biasa (Prasajo 2021).

Sedikitnya mahasiswa Universitas Indonesia yang memiliki sikap tidak tertarik dan tidak mengharapkan apapun dan rata-rata mahasiswa Universitas Indonesia yang tidak memiliki sikap tersebut terhadap kebijakan pemerintah, menunjukkan bahwa sedikitnya mahasiswa UPI yang memiliki tipe budaya politik parokial. Tipe budaya politik parokial ini merupakan orientasi masyarakat yang tidak menaruh minat terhadap objek politik secara sepenuhnya (Riyanto 2006). Hal ini ditunjukkan dengan sikap mahasiswa UPI yang memiliki ketertarikan terhadap kebijakan yang diberikan pemerintah dan menyadari adanya kekuasaan politik dalam masyarakat.

Hasil data pada diagram 8, dimana sikap mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia rata-rata menunjukkan sikap menentang ataupun mendukung kebijakan pemerintah setelah mengetahui informasi tersebut melalui media sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata mahasiswa memiliki orientasi politik afektif. Dimana orientasi politik afektif menunjukkan sikap melalui perasaan dalam keterlibatan, penolakan dalam peranan politik (Sarbaini et al. 2014). Pada orientasi ini seseorang memiliki perasaan subjektif tertentu terhadap berbagai aspek sistem politik, dapat berupa penerimaan

atau penolakan dari sistem politik tersebut baik dari bagian tertentu atau keseluruhan (AbdulKarim and Ratmaningsih 2012).

Lalu pada data dari diagram 7 menunjukkan sedikitnya mahasiswa Universitas Indonesia yang memiliki sikap menerima dengan pasrah dan apa adanya apapun dan rata-rata mahasiswa Universitas Indonesia yang menerima dengan pasrah dan apa adanya terhadap kebijakan pemerintah karena kebijakan tersebut tidak dapat ditentang ataupun diubah. Dan berdasarkan data diagram 8 yang menunjukkan sikap mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia rata-rata menunjukkan sikap menentang ataupun mendukung kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa UPI tidak memiliki tipe budaya politik Kaula. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Riyanto pada tipe budaya politik kaula orientasi masyarakat terhadap politik telah memiliki minat, perhatian, terhadap sistem politik namun dalam frekuensi yang masih rendah. Masyarakat berada di posisi pasif, mereka menganggap bahwa dirinya tidak dapat mempengaruhi atau mengubah sistem yang ada dan menyerah terhadap kebijakan yang diberikan (Riyanto 2006).

Dari data diagram 9, menunjukkan sikap mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia setelah mengetahui informasi mengenai kebijakan pemerintah melalui media sosial, mahasiswa condong perilaku dan sikap yang mengkritisi dan menilai kebijakan pemerintah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia memiliki orientasi politik evaluative, yang mana menunjukkan keputusan atau pendapat masyarakat terhadap objek politik yang diketahui dan dirasakan dalam sistem politik. Dengan cara menilai moralitas politik, pengetahuan dan cara mereka dalam membuat kebijakan politik (AbdulKarim and Ratmaningsih 2012).

Dengan mengkritisi dan menilai kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia menunjukkan adanya orientasi politik dalam dimensi input. Orientasi pada dimensi input ini dapat ditunjukkan dengan memberikan tuntutan masyarakat terhadap proses pembuatan kebijakan. Tuntutan tersebut akan masuk kedalam proses sistem politik yang disalurkan sebagai aspirasi masyarakat (Prasojo 2021).

Dan pada diagram 10 menunjukkan sedikit mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dalam merespon kebijakan pemerintah dengan berkomentar langsung melalui kolom komentar atau mengunggah ke media sosial. Dan banyak mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang tidak merespon kebijakan pemerintah dengan berkomentar langsung melalui kolom komentar atau mengunggah di media sosial. Menunjukkan bahwa terdapat beberapa mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana menyampaikan tuntutan atau aspirasi. Melalui media sosial ini dapat membangunkan opini dan partisipasi dari mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Karena media sosial ini memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait penyebaran informasi dan dapat memberikan komentar serta membangun opini terhadap informasi tersebut (Prasojo 2021).

Dapat dilihat dari hasil data diagram 9 dan 10, mahasiswa memiliki sikap yang merespon kebijakan pemerintah dengan mengkritisi dan menilai kebijakan politik baik secara berkomentar secara langsung atau mengunggah di pendapatnya di media sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa UPI memiliki orientasi politik yang termasuk ke dalam budaya politik partisipan. Yang mana tipe budaya politik ini menunjukkan adanya perilaku seseorang yang aktif di dalam kehidupan politik. Dengan menyadari hak dan kewajibannya dapat menilai dengan penuh kesadaran terhadap sistem politik dari proses input dan output (Riyanto 2006).

Pada rumusan masalah ini mengenai tanggapan mahasiswa setelah mendapatkan informasi melalui media sosial dalam menyikapi kebijakan yang diberikan oleh pemerintah menunjukkan bahwa sebagian banyak mahasiswa telah berada di tipe budaya politik partisipan dengan orientasi politiknya yang evaluative terhadap berbagai objek politik termasuk kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Apabila dilihat secara keseluruhan masih ada beberapa mahasiswa yang memiliki orientasi politik kognitif dan afektif. Dan dapat dilihat pula bahwa

sebagian kecil lainnya mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia memiliki tipe budaya politik parokial dan kaula.

Simpulan

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah wajah media komunikasi dengan lahirnya media sosial sebagai platform online yang memberikan fleksibilitas dan kebebasan bagi pengguna untuk berpartisipasi, berbagi, dan berinteraksi dalam ranah politik. Media sosial telah menjadi alat komunikasi politik yang penting, memungkinkan penyebaran informasi terkait kebijakan pemerintah serta peristiwa politik dengan cepat dan luas. Melalui berbagai platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube, individu dapat dengan mudah mengakses informasi politik dari akun pribadi maupun organisasi politik. Media sosial juga memiliki dampak yang signifikan terhadap orientasi politik individu, memengaruhi aspek kognitif, afektif, dan evaluatif dalam interaksi mereka dengan kehidupan politik. Bahkan, media sosial mampu mempengaruhi tipe budaya politik yang dimiliki individu, dari yang parokial hingga yang partisipan, dengan memberikan platform bagi setiap individu untuk mengkritisi kebijakan pemerintah dan berpartisipasi aktif dalam proses politik secara online.

Referensi

- AbdulKarim, Aim, and Neiny Ratmaningsih. 2012. "Budaya Politik, Partisipasi Politik Dan Demokrasi Sebagai Sistem Sosial Politik Indonesia." *Sistem Politik Indonesia* 1–50.
- Abdullah, Prof. Ma'ruf. 2015. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Sleman.
- Alam, Sukma. 2021. "Penggunaan Media Sosial Sebagai Alat Komunikasi Politik." *Avant Garde Jurnal Ilmu Komunikasi* 9(1):67. doi: 10.36080/ag.v9i1.1257.
- Alfiyani, Nur. 2018. "Media Sosial Sebagai Strategi Komunikasi Politik." *Potret Pemikiran* 22(1). doi: 10.30984/pp.v22i1.762.
- Anshari, Faridhian. 2013. "Komunikasi Politik Di Era Media Sosial." *Jurnal Komunikasi* 8(1):91–101.
- Anggraeni, L., Anggraeni, L., Affandi, I., Wahyudin, D., Paramitha, S. T., & Gilang, M. (2022). *Optimization of the Board Game as a Platform for the Concept of Peace Education: A Survey Method Study To cite this article: method study. International Journal of Education in Mathematics, Science, and Technology Optimization of the Board Game as a*.
- Anggraeni, L., Darmawan, C., & Tanszil, S. W. (2020). *The Use of Comic-Based Technology: Media Cultivation of Values in the Nation Defense*. 418(Acec 2019), 428–431. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.081>
- Anggraeni, L., Darmawan, C., Tanszil, S. W., & Jubaedah, E. (2021). Promoting Ksatria Bela Negara comic through the Webtoon for the prevention and control Covid-19. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 138–147. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.39377>
- Budiyono. 2015. "Fenomena Komunikasi Politik Dalam Media Sosial Political Communication Phenomenon in Social Media." *Fenomena Komunikasi Politik Dalam Media Sosial Political Communication Phenomenon in Social Media* 17(2):143–.
- Kepios, We are Social. 2022. "Digital 2022 Indonesia." 24–84.
- Malihah, E., Nurbayani, S., & Anggraeni, L. (2020). Why is There Zero Women Candidate for Governor Election in West Java, Indonesia? *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 12(1), 1–11. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v12i1.21373>
- Paramitha, S. T., Hasan, M. F., Anggraeni, L., Noviyanti, M., Ilsa, F., Gilang Ramadhan, M., Maharani, A., & Kodrat, H. (2021). Analysis and evaluation of law number 12 of 2012 concerning higher education based on sports needs for students. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(2), 191–199. <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/42249>
- Paramitha, S. T., Hasan, M. F., Ilsa, M. N. F., Anggraeni, L., & Gilang Ramadhan, M. (2021). Level of physical activity of Indonesian esport athletes in the piala Presiden esport 2019. *Jurnal SPORTIF: Jurnal Penelitian Pembelajaran*, 7(1), 71–83. https://doi.org/10.29407/js_unpgri.v7i1.15642
- Prasojo, Prasojo. 2021. "Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Perubahan Budaya Politik." *Jurnal Kajian Ilmiah* 21(2):209–18. doi: 10.31599/jki.v21i2.590.
- Purworini, Dian. 2014. "Model Informasi Publik Di Era Media Sosial: Kajian Grounded Teori Di

- Pemda Sukoharjo.” *Jurnal Komuniti* 6(1):3–15.
- Riyanto, Astim. 2006. *Budaya Politik Indonesia*.
- Sarbaini, Mariatul Kiftiah, and Gazali Rahman. 2014. “Orientasi Politik Masyarakat Terhadap Pemilihan Partai Politik Di Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 4(November):600–607.
- Siagian, Haidir Fitra. 2015. “Pengaruh Dan Efektivitas Penggunaan Media Sosial Sebagai Saluran Komunikasi Politik Dalam Membentuk Opini Publik.” *Al-Khitabah* 11:17–26.
- Susanto, Indra. 2012. *Kebijakan Pemerintah Daerah*. Banyumas: Fakultas Hukum UMP.